



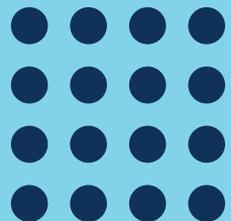
PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI SUMATERA BARAT

2020



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT





PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI SUMATERA BARAT

2020



PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT 2020

ISSN : 2723-1828
Nomor Publikasi : 13000.2157
Katalog : 4101032.13
Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 46

Naskah:

BPS Provinsi Sumatera Barat

Penyunting:

BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Sumatera Barat

Ilustrasi Kulit:

Icon Anggota Keluarga

Sumber Gambar:

freepik.com/

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dicetak Oleh:

CV. Graphic Dwipa (cetakan I)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

PROFIL KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT 2020

Pengarah : Ir. Herum Fajarwati, MM

Penanggung Jawab : Krido Saptono, S.Si, M.Si

Editor : Krido Saptono, S.Si, M.Si
Iman Teguh Raharto, S.Si, M.Si
Ir. Yunimarlita
Sumi Lestari, S.Si
Nurwinda Anggun Primaharti. S.ST

Penulis : Mila Artati, S.ST, M.Stat

Pengolah Data : Mila Artati, S.ST, M.Stat

KATA PENGANTAR

Buku publikasi “Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat 2020” merupakan salah satu publikasi rutin yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Buku ini menyajikan informasi mengenai profil kependudukan di Provinsi Sumatera Barat serta keadaan Keluarga Barendananya. Selain itu juga untuk melihat pembangunan kependudukan yang dihubungkan dengan penggunaan alat kontrasepsi.

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini ada dua yaitu data SP2020 dan Susenas Maret 2020. Data struktur kependudukan bersumber dari data SP2020 sedangkan data mengenai Keluarga Berencana bersumber dari olahan data Susenas Maret 2020. Buku ini adalah publikasi ke enam sejak buku ini diterbitkan. Diharapkan dengan adanya data yang berkesinambungan, dapat memenuhi kebutuhan data para pengguna data.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih. Demi meningkatkan kualitas publikasi di masa mendatang, kritik dan saran dari pengguna data akan kami terima.

Padang, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat



Ir. Herum Fajarwati, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Sistematika Penulisan	5
2. Metodologi	7
2.1 Sumber Data	9
2.2 Konsep dan Definisi	9
3. Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	13
3.1 Profil Kependudukan	15
3.2 Keluarga Berencana	18
4. Pembangunan Kependudukan	31
4.1 Pembangunan Kependudukan	33
4.2 Umur Perkawinan Pertama	33
5. Penutup	39
Daftar Pustaka	43

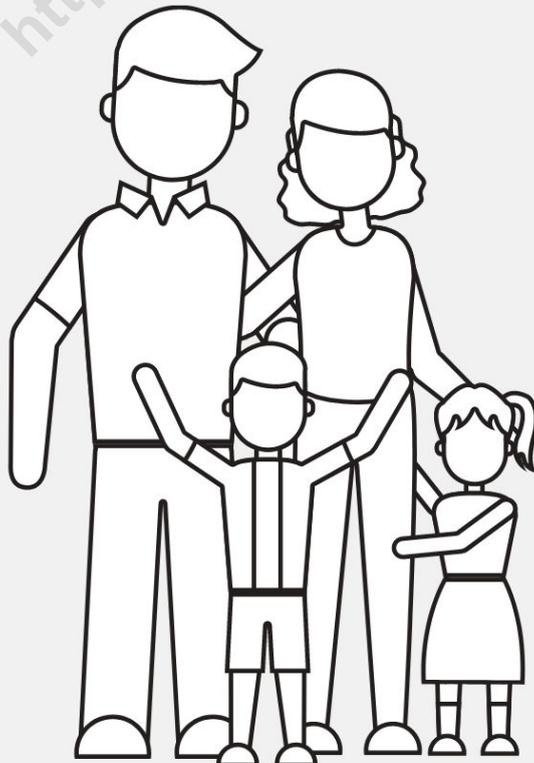
DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1.1 Beberapa Indikator Demografi Provinsi Sumatera Barat, 2020.....	16
3.2.1 Persentase Perempuan Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, Wilayah Tempat Tinggal dan Golongan Pengeluaran di Provinsi Sumatera Barat, 2020.....	24
3.2.2 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2020.....	21
3.2.3 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan, Golongan Pengeluaran dan Alat/Cara Ber-KB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	29
4.2.1 Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.....	34
4.2.2 Persentase Laki-laki dan Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama Laki-laki di bawah 19 tahun dan Perempuan di bawah 16 Tahun menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2020	35
4.2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Usia Perkawinan Pertama di Bawah 16 Tahun dan Penggunaan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2020	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1.1 Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat, 2020.....	17
3.2.1 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Tidak Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2020.....	20
3.2.2 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2020.....	21
3.2.3 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Pernah/Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2020	22
3.2.4 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Kelompok Kapan Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir di Provinsi Sumatera Barat, 2020	23
4.2.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di Bawah 16 Tahun Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan yang di Tamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2020	36
4.2.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Usia Perkawinan Pertama di Bawah 16 Tahun dan Tidak/Pernah Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2020	37

BAB I PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari segi jumlah penduduk, Indonesia menempati urutan ke empat terbesar di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 berjumlah 270 juta. Jumlah penduduk yang besar ini menjadikan isu kependudukan adalah prioritas penting bagi Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu pembangunan berwawasan kependudukan, menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, memfasilitasi pembangunan keluarga, mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana.

Adapun strategi khusus yang perlu dikembangkan untuk negara yang memiliki penduduk besar serta yang mengalami masalah kesehatan adalah program Keluarga Berencana (KB). Program KB juga bertujuan untuk mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030. Masalah kependudukan merupakan masalah jangka panjang sehingga penanggulangannya dilaksanakan secara berkesinambungan. Kuantitas penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar pembangunan jika ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Namun bisa menjadi beban yang bertambah berat apabila kuantitas yang besar tidak didukung dengan kualitas yang memadai.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, Indonesia sudah memasuki bonus demografi pertama. Bonus demografi pertama terjadi karena perubahan struktur penduduk yang mengakibatkan

perubahan pola konsumsi dan produksi sehingga lebih banyak penduduk usia produktif dan lebih banyak tenaga kerja (BPS, 2015). Untuk itu pemerintah perlu memikirkan kebutuhan investasi yang cukup besar untuk pembangunan ekonomi serta kesejahteraan keluarga.

Pada tahap implementasi, pemerintah daerah harus memiliki pemahaman dan tujuan yang sama sehingga permasalahan kependudukan juga menjadi tujuan pembangunan daerah. Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat “Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana” menempati urutan ke-16 dari Permasalahan Pembangunan Daerah (Bappeda Sumbar, 2016). Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi perkembangan kependudukan dapat dilihat dengan pendekatan indikator kependudukan dan keluarga berencana. Keluarga berencana diyakini telah merubah struktur kependudukan tidak hanya dalam artian mengendalikan laju pertumbuhan penduduk namun juga pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil berkualitas (BKKBN Riau, 2016).

Indikator kependudukan dan keluarga berencana yang akan dibahas adalah indikator demografi yang mencakup usia perkawinan pertama, Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (*Contraception Prevalency Rate*), Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh perempuan, *Dependency Ratio*, serta Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama.

1.2 Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan pokok penulisan Publikasi “Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat 2020”, yaitu:

1. Untuk mengetahui pembangunan kependudukan dilihat dari aspek kesehatan penduduk terutama dalam hal penggunaan alat KB dan pelayanan KB yang telah dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020

2. Untuk memonitoring prevalensi KB yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

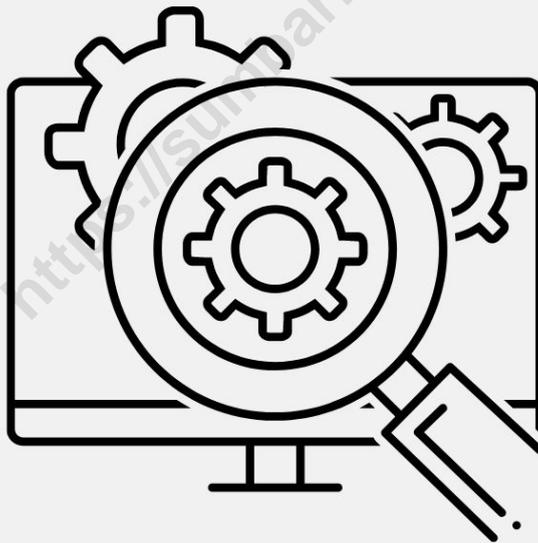
1.3 Sistematika Penulisan

Pembahasan utama dirinci ke dalam lima bab sesuai tema besar profil statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab 1. pendahuluan berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penulisan.
- b. Bab 2. metodologi, berisi tentang ruang lingkup dan konsep/ definisi yang digunakan penulisan publikasi.
- c. Bab 3. menjelaskan informasi umum tentang profil demografi/ kependudukan serta partisipasi KB.
- d. Bab 4. menyajikan pembahasan mengenai hasil pembangunan kependudukan yang tercermin dari indikator umur perkawinan pertama.
- e. Bab 5. penutup, berisi ringkasan tentang kondisi kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Sumatera Barat secara umum.

BAB II

METODOLOGI



BAB 2 METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan dan penyusunan indikator kependudukan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Sensus Penduduk 2020. Data tentang penghitungan dan penyusunan indikator Keluarga Berencana (KB) bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020.

2.2 Konsep dan Definisi

Pembahasan yang disajikan dalam indikator kependudukan dan keluarga berencana ini menggunakan metode analisis deskriptif baik menyangkut Provinsi Sumatera Barat maupun perbandingan antara daerah perdesaan dan perkotaan serta perbandingan antar jenis kelamin. Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan disajikan di bawah ini.

Penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama dua belas bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari dua belas bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari dua belas bulan.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu.

Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam blok sensus yang sama, maka dianggap sebagai satu rumah tangga.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari enam bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama enam bulan atau lebih, atau kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama enam bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah enam bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari enam bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) adalah angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Beban Tanggungan Anak-anak (*Child Dependency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia di bawah 15 tahun dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah jumlah penduduk yang diwakili oleh penduduk perempuan berumur 15-49 yang berstatus kawin.

Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*) adalah proporsi penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB atau pasangannya yang sedang menggunakan alat/cara KB terhadap jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun. Alat/cara KB yang dimaksud adalah baik alat/cara KB modern maupun yang tradisional.

Persentase Pernah Menggunakan Alat/Cara KB adalah proporsi penduduk perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah menggunakan alat/cara KB terhadap jumlah penduduk perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun.

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Berumur 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat/Cara KB adalah pasangan usia subur (PUS) berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat/cara KB terhadap jumlah pasangan usia subur berumur 15-49 tahun.

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) berumur 15-49 Tahun Menggunakan Alat/cara KB dan Pernah Berhenti adalah pasangan usia subur (PUS) berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat/cara KB dan pernah berhenti terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS) berumur 15-49 tahun.

Usia Perkawinan Pertama adalah usia pertama kali laki-laki atau perempuan melakukan hubungan seksual pertama kali.

BAB III

PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

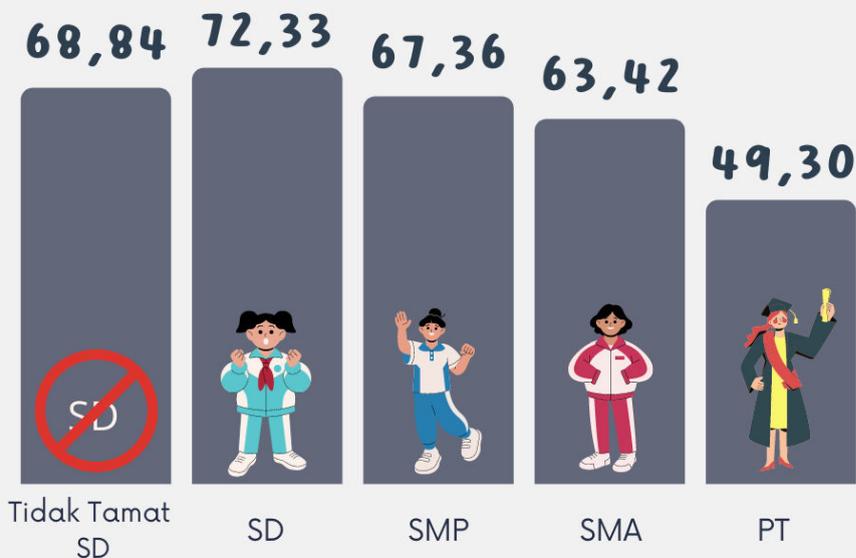


SEX RATIO
SUMATERA BARAT, 2020

101,39

"SETIAP 100 PENDUDUK
PEREMPUAN TERDAPAT 101
PENDUDUK LAKI-LAKI"

PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN PEREMPUAN KAWIN
YANG PERNAH/SEDANG MENGGUNAKAN ALAT/CARA KB
DI PROVINSI SUMATERA BARAT, 2020



BAB 3

PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Profil Kependudukan Provinsi Sumatera Barat

Komposisi dan struktur penduduk dapat diketahui dari profil kependudukan atau gambaran demografi suatu daerah. Profil kependudukan tersebut sangat berguna bagi perencanaan pembangunan. Apabila daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah dengan struktur penduduk umur muda, berarti perencanaan pembangunan dapat diprioritaskan kepada penyerapan tenaga kerja atau perluasan pendidikan. Dari profil kependudukan juga dapat membantu perencanaan kesehatan misalkan apabila dikategorikan sebagai wilayah dengan struktur penduduk umur muda berarti tingkat kelahiran dan kematian relatif tinggi, sehingga pemerintah harus memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dasar agar dapat menekan angka kematian dan menolong persalinan dengan aman.

Dari gambaran demografi dapat juga dicari angka beban ketergantungan. Dengan melihat angka beban ketergantungan dapat dirancang apakah daerah tersebut membutuhkan sekolah (apabila angka ketergantungan banyak di umur muda yaitu antara 0-14 tahun) atau malah membutuhkan jaminan sosial karena angka ketergantungan banyak di umur tua yaitu 65 tahun ke atas. Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi yang memiliki hubungan dengan perekonomian adalah penduduk umur muda. Wilayah yang memiliki penduduk dengan umur produktif kerja merupakan sebuah kekuatan dalam ekonomi nasional jika mereka bisa mendapatkan pendidikan yang memadai dan punya banyak kesempatan kerja. Selain kategori di atas, kondisi wilayah juga dapat dilihat dari rasio penduduk tua muda. Apabila Rasio tua muda di bawah 15 maka dapat dikategorikan sebagai penduduk kelompok muda, sedangkan di atas 30 termasuk kategori kelompok tua (BPS, 2010).

Berdasarkan hasil SP2020 jumlah penduduk laki-laki Sumatera Barat lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan atau dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 101,39. Dengan kata lain setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Lebih lanjut rasio jenis kelamin pada umur 15-49 tahun di Sumatera Barat sebesar 104,71. Ini menunjukkan pada umur muda dan produktif tidak banyak penduduk laki-laki yang bermigrasi ke luar. Apabila dijumpai rasio jenis kelamin pada umur 15-49 tahun yang nilainya di bawah 100, berarti ini mengindikasikan adanya migrasi keluar bagi penduduk laki-laki (Columbia University, 2016).

Tabel 3.1.1 Beberapa Indikator Demografi Provinsi Sumatera Barat, 2020

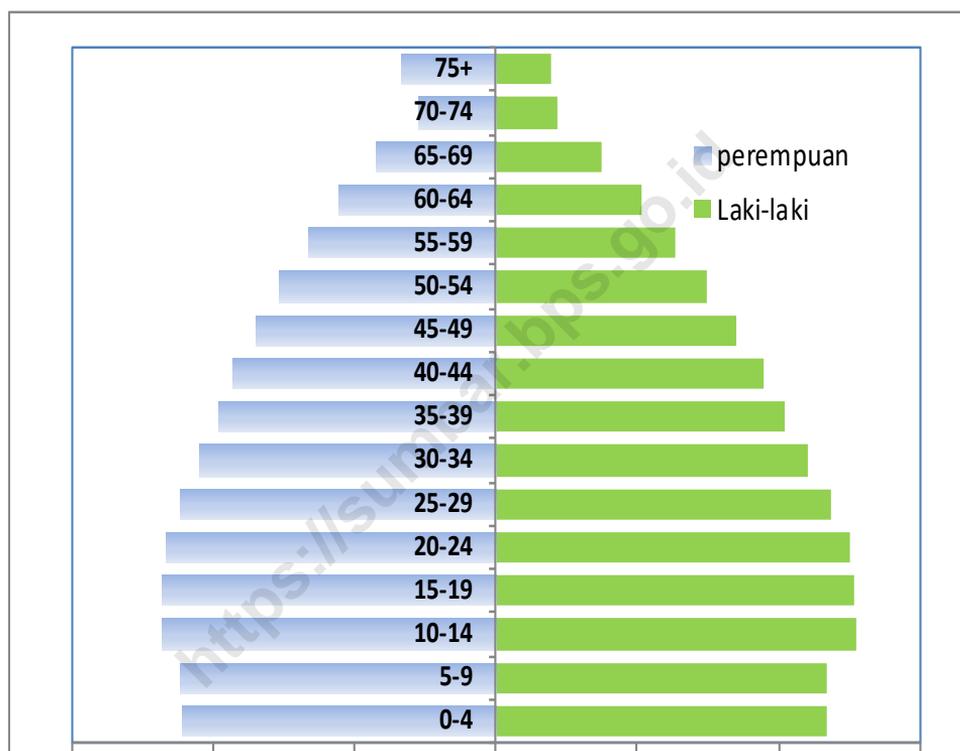
Indikator Demografi	Uraian
(1)	(2)
Rasio Tua Muda	25,94
<i>Sex Ratio</i>	101,39
<i>Sex ratio</i> Umur 15-49 tahun	104,71
<i>Dependency ratio</i>	47,09
<i>Child Dependency ratio</i>	37,39

Sumber: Sensus Penduduk 2020

Di dalam analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (a) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun; (b) kelompok umur produktif, umur 15 – 64 tahun; dan (c) kelompok umur tua, umur 65 tahun ke atas. Struktur umur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk umur muda sebanyak 40 persen atau lebih sementara kelompok umur tua kurang atau sama dengan 5 persen. Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua apabila kelompok umur mudanya sebanyak 30 persen atau kurang sementara kelompok umur tuanya lebih besar atau sama dengan 10 persen (Tjiptoherijanto, 2001).

Berdasarkan kategori-kategori tersebut nampak bahwa telah terjadi proses transisi umur penduduk Sumatera Barat dari penduduk muda menuju penduduk tua (*ageing process*). *Ageing proses* tersebut akan terus berlangsung dari tahun ke tahun.

Gambar 3.1.1 Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat, 2020



Sumber: Sensus Penduduk 2020

Pergeseran struktur umur muda ke umur produktif akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Sedangkan pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk umur lanjut.

Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan umur lanjut dari keluarga ke institusi. Apabila keadaan ini terjadi, maka tanggung jawab pemerintah akan menjadi bertambah berat (Tjiptoherijanto, 1995).

Dari gambar piramida penduduk (Gambar 3.1.1) terlihat bahwa struktur penduduk di Sumatera Barat cenderung sudah meninggalkan struktur penduduk muda. Ini ditunjukkan oleh bentuk piramida tersebut yang punya kecenderungan melebar di kelompok umur muda dan juga dari angka rasio tua muda penduduk Sumatera Barat tahun 2020 yang mencapai 25,94 persen.

Berdasarkan Gambar 3.1.1 juga dapat dilihat sebagian besar penduduk Sumatera Barat adalah kelompok umur produktif (umur 15-64 tahun), yang mencapai 67,98 persen kemudian kelompok umur muda (umur 0-14 tahun) mencapai 25,43 persen dan kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 6,59 persen. Kelompok umur muda dan umur tua dapat dikelompokkan juga sebagai kelompok umur non produktif, yang mencapai 32,02 persen. Dengan membandingkan kelompok umur non produktif dengan kelompok umur produktif diperoleh angka rasio ketergantungan penduduk Sumatera Barat sebesar 47,09 persen, artinya setiap 100 orang berumur produktif di Sumatera Barat menanggung 47 orang yang non produktif. Jika kelompok umur muda (anak-anak) dibandingkan kelompok umur produktif diperoleh angka rasio ketergantungan untuk anak-anak sebesar 37,39 persen, artinya setiap 100 orang berumur produktif di Sumatera Barat menanggung 38 orang anak-anak.

3.2 Keluarga Berencana

Kunci pengendalian jumlah penduduk adalah dari keluarga inti. Keluarga yang memiliki jumlah anak tidak lebih dari yang bisa dipelihara dengan baik, akan menjamin keluarga tersebut dari permasalahan kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan lainnya. Beberapa pengikut teori Malthus yang disebut Neo Malthusianism beranggapan bahwa untuk menghambat jumlah kelahiran tidak mungkin hanya mengandalkan *moral restraint* (berpuasa, penundaan perkawinan, penegakan moral). Sehingga disarankan metode *Birth Control* dengan penggunaan alat kontrasepsi yang akhirnya disebut *family planning* (Pandi, E.Srihartati, 1981).

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam penandatanganan berbagai instrumen hak azasi manusia. Indonesia juga memiliki komitmen terhadap berbagai program pembangunan kesehatan dan keluarga berencana yang tertuang dalam Program Aksi *International Conference on Family Planning* (ICPD), Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) termasuk di dalamnya kemitraan global keluarga berencana yang dikenal dengan *Family Planning 2020* (FP2020) yang dicanangkan di tahun 2012.

FP2020 bertujuan untuk mendukung hak-hak setiap perempuan untuk dapat menentukan, secara bebas, dan untuk diri mereka sendiri, apakah mereka ingin memiliki anak, kapan akan memilikinya, dan berapa jumlah anak yang ingin dimiliki. Pembatasan atau pengendalian jumlah anggota keluarga diprogramkan melalui pelaksanaan Keluarga Berencana (KB). KB telah banyak mengubah struktur kependudukan Indonesia, tidak hanya dalam arti menurunkan tingkat kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, juga mengubah pandangan hidup penduduk terhadap nilai anak serta kesejahteraan dan ketahanan keluarga (Bappenas, 2016). Sehingga pengendalian pertumbuhan penduduk dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan Keluarga Kecil Berkualitas dapat terwujud. Inti dari Keluarga Kecil Berkualitas dipahami sebagai pembatasan jumlah anggota keluarga sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga tersebut.

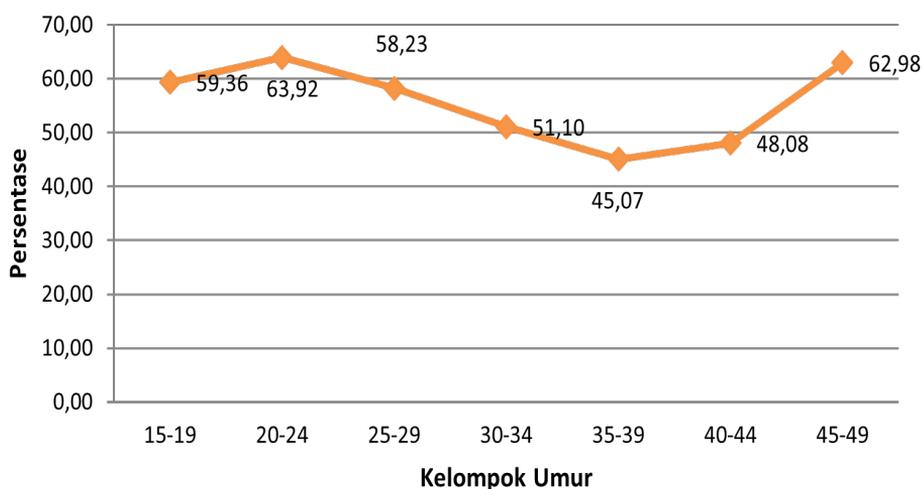
Pembangunan kependudukan sudah menjadi prioritas pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, yaitu terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Salah satu misi yang dicanangkan di dalam mewujudkan visi pembangunan Sumatera Barat adalah “Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi”. Untuk mencapai misi tersebut, diuraikan dalam bentuk tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan misi tersebut ada 5 tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan dicanangkan

di tujuan 5, yaitu: “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak”.

Untuk mengetahui kebijakan dan program yang tepat untuk pelaksanaan KB, perlu diketahui perilaku (*behavior*) dari target populasi. Di sini yang menjadi target populasi adalah pasangan usia subur, dalam bahasan berikut pasangan usia subur didekati dengan penduduk perempuan yang berstatus kawin dan berumur antara 15 hingga 49 tahun. Perilaku berbeda dapat dilihat dari tempat tinggal, jumlah anak yang dilahirkan hidup, pendidikan yang ditamatkan dan kelompok pengeluaran.

Informasi mengenai pasangan usia subur yang sudah tidak menggunakan alat/cara KB sangat bermanfaat bagi pembuat keputusan. Informasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi kenapa pasangan usia subur ini memutuskan untuk tidak lagi menggunakan alat/cara KB sehingga pembuat program dapat merancang program lainnya yang sekiranya lebih sesuai dan tepat sasaran.

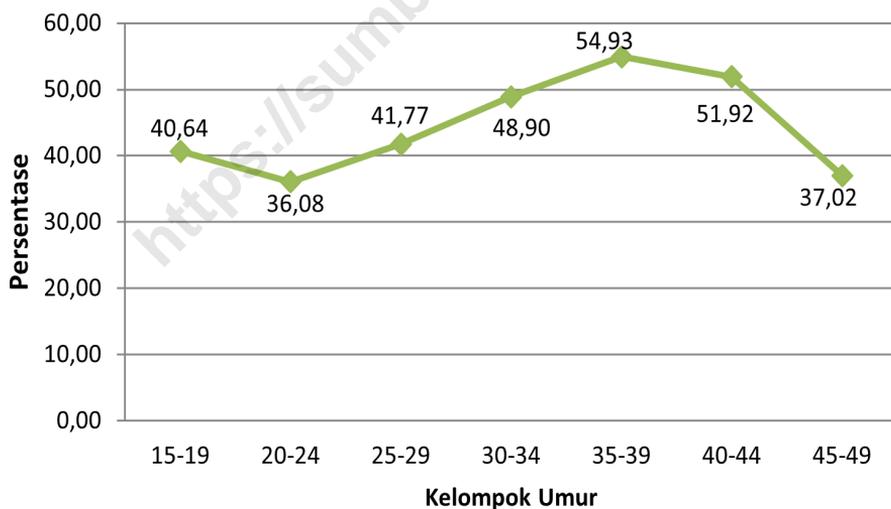
Gambar 3.2.1 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Tidak Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020

Dari Gambar 3.2.1 terlihat bahwa pola yang disajikan menurut kelompok umur cenderung membentuk huruf U. Pada kelompok umur muda persentase perempuan yang tidak menggunakan alat/cara KB relatif besar dan semakin turun pada kelompok umur puncak masa reproduksi perempuan (kelompok umur 35-39 tahun). Ini dapat mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya umur masa reproduksi, pasangan usia subur ini merasakan keharusan untuk menggunakan alat/cara KB. Namun karena alasan lainnya membuat pasangan usia subur memutuskan tidak menggunakan atau memilih untuk tidak menggunakan alat/cara KB tertentu. Puncaknya berada pada perempuan kelompok umur 45-49 tahun, kelompok umur di ujung masa reproduksi, yaitu sebesar 62,98 persen.

Gambar 3.2.2 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2020



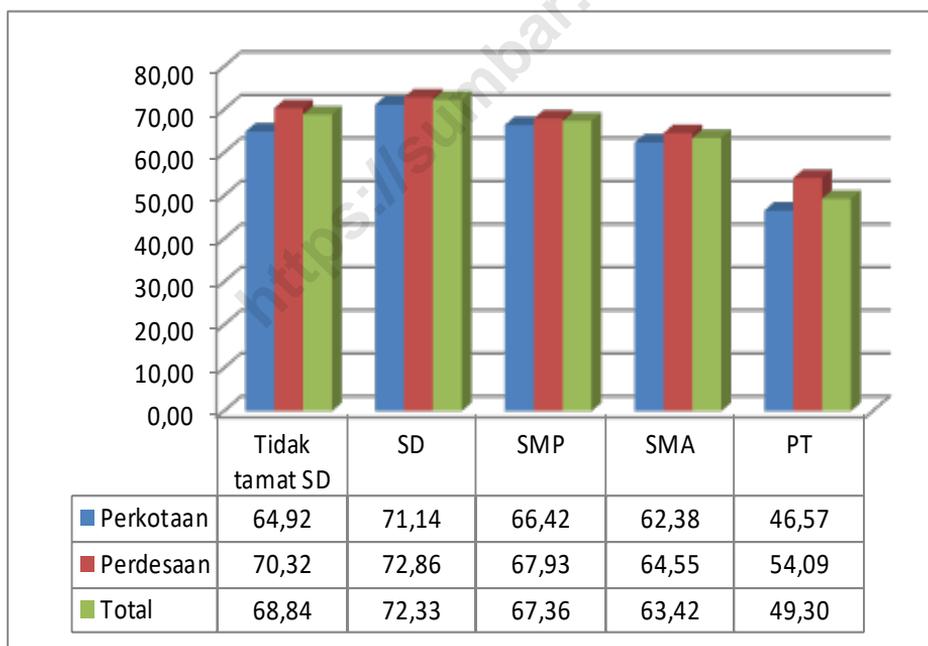
Sumber: Susenas Maret 2020

Gambar 3.2.2 menunjukkan perilaku pemakaian alat/cara KB diantara perempuan yang berstatus kawin menurut kelompok umur. Sesuai dengan teori pemakaian KB, gambar yang terbentuk adalah huruf U terbalik (K. Widyanti, 2011). Di kelompok umur muda pemakaian alat/cara KB relatif rendah karena di masa-masa awal reproduksi perempuan dan pasangannya berkeinginan untuk punya

anak. Kemudian kebutuhan ber-KB akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya umur perempuan. Dapat dilihat dari gambar 3.2.2, puncak masa reproduksi perempuan berada di kelompok umur 35-39 tahun yaitu 54,93 persen.

Terdapat perbedaan perilaku penggunaan alat/cara KB menurut pendidikan yang ditamatkan. Secara total di Sumatera Barat, semakin tinggi pendidikan perempuan kecenderungan untuk menggunakan alat/cara KB semakin rendah. Hal ini dapat dilihat dari gambar 3.2.3 berikut:

Gambar 3.2.3 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Pernah/Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2020

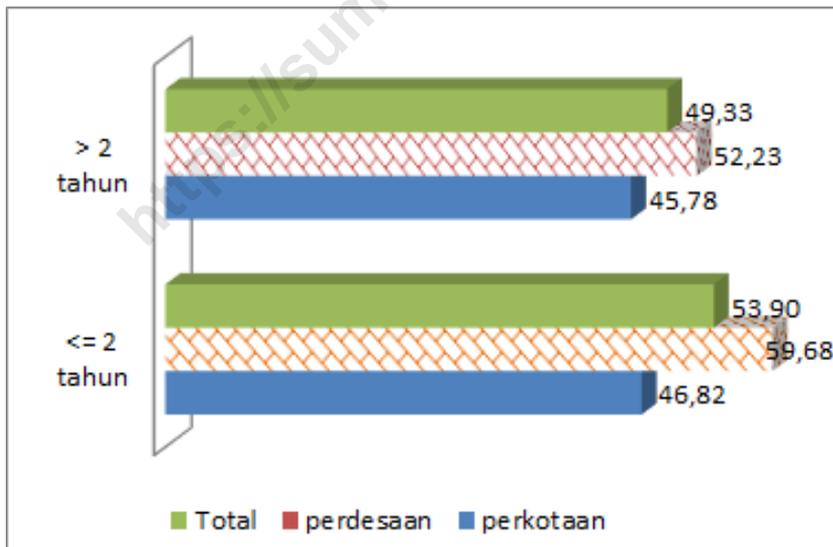


Sumber: Susenas Maret 2020

Dari Gambar 3.2.3 terlihat untuk Provinsi Sumatera Barat persentase tertinggi dari perempuan kawin yang pernah/sedang menggunakan alat/cara KB adalah perempuan yang tamat SD yaitu sebesar 72,33 persen. Persentase terendah yang sedang/pernah

menggunakan alat/cara KB adalah perempuan yang tamatan perguruan tinggi yaitu 49,30 persen. Pola perilaku pemakaian alat/cara KB ini juga terlihat berbeda menurut tempat tinggal. Jika dilihat persentase perempuan yang pernah/sedang menggunakan alat/cara KB paling rendah di daerah perkotaan dan perdesaan adalah perempuan dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, yaitu masing-masing sebesar 46,57 persen dan 54,09 persen. Sementara persentase tertinggi penggunaan alat/cara KB untuk daerah perkotaan adalah perempuan yang tamat SD yaitu sebesar 71,14 persen dan di daerah perdesaan adalah persentase perempuan yang tamat SD yaitu sebesar 72,86 persen.

Gambar 3.2.4 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Kelompok Kapan Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir di Provinsi Sumatera Barat, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020

Perilaku menggunakan cara/alat KB antara pasangan usia subur yang melahirkan anak lahir hidup terakhir pada dua tahun lalu atau kurang (setelah tahun 2018) dengan yang lebih dari 2 tahun lalu (sebelum tahun 2018) juga menunjukkan pola yang berbeda.

Kelompok pasangan yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) lebih dari dua tahun yang lalu relatif kecil dari kelompok pasangan yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) kurang atau sama dengan dua tahun yang lalu. Hal ini mungkin adanya keinginan pasangan tersebut untuk segera memiliki anak. Ketika pasangan baru dua tahun yang lalu atau kurang melahirkan ALH, persentase penggunaan alat/cara KB lebih besar. Hal ini kemungkinan setelah memiliki anak, pasangan usia subur ingin mengatur jarak kelahiran anak. Pola ini terjadi baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 3.2.1 Persentase Perempuan Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, Wilayah Tempat Tinggal dan Golongan Pengeluaran di Provinsi Sumatera Barat, 2020

Wilayah Tempat Tinggal/ Golongan Pengeluaran	Status Penggunaan Alat/Cara KB	
	Prevalensi Pemakaian KB (CPR)	Tidak
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	41,76	58,24
40 % terendah	52,10	47,90
40 % sedang	43,67	56,33
20 % tinggi	28,52	71,48
Perdesaan	50,23	49,77
40 % terendah	52,38	47,62
40 % sedang	50,07	49,93
20 % tinggi	42,04	57,96
Perkotaan + Perdesaan	46,37	53,63
40 % terendah	52,28	47,72
40 % sedang	47,21	52,79
20 % tinggi	32,83	67,17

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 3.2.1 menyajikan status penggunaan alat/cara KB menurut wilayah tempat tinggal dan status ekonomi rumah tangga. Pada tabel tersebut terlihat bahwa prevalensi pemakaian KB (CPR)

berbanding terbalik dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Sejalan dengan itu semakin tinggi status ekonomi rumah tangga tersebut kecenderungan untuk tidak menggunakan alat/cara KB juga semakin meningkat. CPR dari rumah tangga dengan golongan pengeluaran tinggi sebesar 32,83 persen, sementara yang berasal dari rumah tangga dengan golongan pengeluaran sedang dan rendah masing-masing sebesar 47,21 persen dan 52,28 persen. Terlihat juga bahwa lebih dari separuh golongan pengeluaran tinggi tidak menggunakan KB (67,17 %).

Dilihat menurut tipe daerah, terdapat pola yang sama. Baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, semakin tinggi golongan pengeluaran, semakin rendah angka CPR dan semakin tinggi angka tidak menggunakan KB. Ini menarik untuk ditelusuri, apakah pasangan yang berasal dari golongan pengeluaran tinggi tidak ingin ber-KB. Sehingga konsekuensinya angka kelahiran tinggi berasal dari rumah tangga berpengeluaran tinggi. Jika hal ini memang terbukti maka program KB lebih tepat difokuskan kepada kelompok ini.

Jika dilihat secara keseluruhan, prevalensi pemakaian KB di daerah perkotaan cenderung lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan dengan masing-masing angka CPR adalah 41,76 persen untuk perkotaan dan 50,23 persen untuk daerah perdesaan. Hal ini mengindikasikan masih banyak wanita yang berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin tidak menggunakan alat/cara KB untuk menunda atau mencegah kehamilan sehingga hal ini akan dapat menjadi salah satu faktor pemicu tingginya tingkat kelahiran di daerah perkotaan.

Para pembuat kebijakan, pengelola program, dan peneliti sangat tertarik dengan informasi mengenai pengetahuan, sikap, dan praktek KB. Pengenalan terhadap metode kontrasepsi merupakan salah satu syarat dalam mengadopsi pengaturan fertilitas. Informasi mengenai metode kontrasepsi telah disosialisasikan melalui berbagai jenis media massa sejak dimulainya program keluarga berencana di Indonesia pada tahun 1971. Selain itu informasi mengenai tingkat penggunaan kontrasepsi (prevalensi kontrasepsi) juga penting untuk

mengukur keberhasilan Program Keluarga Berencana. Ada berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, baik dengan metode tradisional maupun modern.

Dalam Susenas Maret 2020, metode penggunaan alat/cara kontrasepsi dikelompokkan menjadi 12 kategori, yaitu: sterilisasi wanita (medis operasi wanita/MOW), sterilisasi pria (medis operasi pria/MOP), pil, alat kontrasepsi dalam rahim/*intra uterine device* (AKDR/IUD/spiral), suntik, susuk/implant, kondom pria, intravag/diafragma/kondom wanita, menyusui alami (metode amenorrhea laktasi/MAL), pantang berkala/kalender, dan metode lainnya.

Sampai sekarang, cara kontrasepsi yang ideal belum ada. Kontrasepsi ideal itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) dapat dipercaya; 2) tidak menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan; 3) daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan; 4) tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan koitus; 5) tidak memerlukan motivasi terus menerus; 6) mudah pelaksanaannya; 7) murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 8) dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan.

Untuk keperluan analisis, alat/cara kontrasepsi dikelompokkan menjadi dua kategori yakni alat/cara modern dan tradisional. Alat/cara modern meliputi: sterilisasi wanita (medis operasi wanita/MOW), sterilisasi pria (medis operasi pria/MOP), pil, alat kontrasepsi dalam rahim/*intra uterine device* (AKDR/IUD/spiral), suntik, susuk, kondom pria dan intravag/diafragma/kondom wanita. Sedangkan alat/cara tradisional meliputi menyusui alami, pantang berkala/kalender, senggama terputus, urut/pijat dan jamu/herbal.

Persentase wanita yang berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin sedang menggunakan alat/cara KB baik metode modern maupun tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan menurut wilayah tempat tinggal dapat dilihat pada Tabel 3.2.2. Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat/cara kontrasepsi dengan metode modern tercatat sebanyak 96,81 persen dan sisanya

3,19 persen menggunakan metode tradisional. Kelompok wanita kawin usia subur baik yang tinggal di daerah perdesaan maupun perkotaan lebih banyak menggunakan alat/cara kontrasepsi metode modern dengan persentase 95,51 persen untuk perkotaan dan 97,70 persen untuk perdesaan.

Tabel 3.2.2 Persentase Perempuan Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Alat/Cara Ber-KB di Provinsi Sumatera Barat, 2020

Alat/Cara KB	Wilayah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Strerilisasi Wanita	10,52	5,01	7,27
Strelisasi Pria	0,36	0,33	0,34
IUD/AKDR/Spiral	17,82	6,41	11,09
Suntikan	42,66	56,20	50,64
Susuk KB/Implan	6,96	14,40	11,34
Pil	13,39	13,44	13,42
Kondom Pria	3,54	1,89	2,56
Kondom Wanita	0,27	0,03	0,13
Metode Menyusui Alami	0,46	0,14	0,27
Pantang Berkala/Kelender	1,99	1,58	1,75
Lainnya	2,03	0,58	1,17

Sumber: Susenas Maret 2020

Terlihat pada Tabel 3.2.2, penggunaan alat/cara KB menggunakan metode suntikan merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh wanita kawin umur 15-49 tahun yaitu sebanyak 50,64 persen. Selain dengan cara suntikan, penggunaan alat KB modern dengan pil menjadi pilihan kedua terbanyak. Jika dilihat menurut wilayah, penggunaan alat/cara KB modern tiga terbanyak di daerah perdesaan adalah suntikan, susuk/implant dan pil. Sedangkan di daerah perkotaan penggunaan suntikan, IUD/ AKDR/spiral, dan pil.

Penggunaan alat/cara KB modern yang kurang diminati wanita kawin usia subur adalah kondom wanita, tercatat sebesar 0,13 persen. Jika dilihat pada alat/cara KB tradisional, metode pantang berkala/kelender lebih diminati dibandingkan metode tradisional lainnya.

Dalam memilih penggunaan alat/cara KB yang sesuai dengan kondisi tubuh kita dibutuhkan pengetahuan dan komunikasi dengan suami dan tenaga medis. Menurut Donald J Bogue (K. Widyanti, 2011), terdapat rintangan berkomunikasi dalam KB, diantaranya:

- a. Perasaan takut bahwa kesehatan akan terganggu karena terlalu lama pakai pil, IUD atau alat kontrasepsi.
- b. Perasaan takut akan akibat sampingan sementara karena pakai pil, IUD atau alat kontrasepsi.
- c. Perasaan takut tanpa alasan terhadap metode vasektomi.
- d. Kurangnya komunikasi suami-istri tentang ukuran besar keluarga ideal, jarak antar anak, metode kontrasepsi yang sebaiknya digunakan apabila mereka menjalankan KB.
- e. Kurangnya perhatian tentang perencanaan jarak anak di kalangan generasi muda.
- f. Pengaruh negatif dari peer group dan orang-orang lebih tua dan sebagainya.

Dari yang disampaikan oleh Bogue sepintas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan pengetahuan tentang alat/cara KB merupakan kunci keberhasilan pasangan untuk ber-KB. Upaya menjalin komunikasi dan mendapatkan pengetahuan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat yang melayani pemakaian alat/cara KB.

Penggunaan alat/cara KB masing-masing wanita kawin dengan tingkat pendidikan dan tingkat pengeluaran yang berbeda-beda dapat dilihat pada Tabel 3.2.3. Proporsi penggunaan alat/cara kontrasepsi yang paling banyak digunakan pada wanita umur 15-49 tahun dengan tingkat pendidikan dibawah SMA/ sederajat adalah suntikan sebesar 53,70 persen dan 14,22 persen menggunakan pil. Sedangkan untuk wanita kawin umur 15-49 tahun

yang berpendidikan Perguruan Tinggi lebih memilih menggunakan suntikan (33,03%) dan IUD/AKDR/spiral (29,66%). Jika dilihat dari tingkat pengeluaran, wanita kawin umur 15-49 tahun yang termasuk golongan pengeluaran rendah dan menengah lebih banyak memilih alat/cara KB menggunakan suntikan dan pil. Sedangkan wanita kawin umur 15-49 tahun dari golongan pengeluaran tinggi lebih banyak memilih menggunakan suntikan dan IUD/AKDR/spiral.

Tabel 3.2.3 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan, Golongan Pengeluaran dan Alat/Cara Ber-KB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Alat/Cara KB	Tingkat Pendidikan		Golongan Pengeluaran		
	≤ SMA	PT	40% Terendah	40% Sedang	20% Tinggi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Strerilisasi Wanita	6,74	10,35	5,96	6,76	12,97
Strelisasi Pria	0,38	0,12	0,17	0,31	1,00
IUD/AKDR/Spiral	7,87	29,66	7,89	8,83	28,01
Suntikan	53,70	33,03	54,83	51,89	33,61
Susuk KB/Implan	12,38	5,38	13,05	11,37	5,84
Pil	14,22	8,80	13,48	14,06	11,31
Kondom Pria	2,09	5,29	1,24	3,55	3,87
Kondom Wanita	0,00	0,87	0,00	0,07	0,71
Metode Menyusui Alami	0,16	0,93	0,30	0,23	0,30
Pantang Berkala/Kelender	1,31	4,25	1,78	1,72	1,76
Lainnya	1,15	1,31	1,31	1,21	0,62

Sumber: Susenas Maret 2020

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

RATA-RATA UMUR PERKAWINAN
PERTAMA (TAHUN) DI PROVINSI
SUMATERA BARAT, 2020



PERKOTAAN

25,00



LAKI-LAKI

20,69



PEREMPUAN



PERDESAAN

26,53

22,55

"RATA-RATA USIA PERKAWINAN PERTAMA
LAKI-LAKI LEBIH TINGGI DARI USIA
PERKAWINAN PEREMPUAN"

BAB 4

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

4.1 Pembangunan Kependudukan

Seperti telah dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa paradigma pembangunan kependudukan tidak hanya upaya untuk pengendalian penduduk namun juga fokus pada kualitas penduduk. Pengendalian penduduk yang dipahami sekarang ini diwujudkan ke dalam perwujudan Keluarga Kecil Berkualitas. Hal ini membuat banyak pasangan melakukan perencanaan ekonomis mengenai mempunyai dan membesarkan anak. Jika jumlah anak terlalu banyak, anak akan menjadi beban dan tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu keinginan mewujudkan keluarga kecil berkualitas juga berdampak kepada perubahan sikap terhadap median usia perkawinan pertama. Maksudnya jika di awal pembangunan rata-rata usia perkawinan pertama perempuan berkisar 15-16 tahun sekarang sudah mulai bergeser ke umur yang lebih tinggi (BKKBN Riau, 2016).

Dua hal di atas, jumlah anak dan pergeseran usia perkawinan pertama perempuan dapat dipandang sebagai keberhasilan pembangunan dalam bidang kependudukan. Dengan kata lain keberhasilan program Keluarga Berencana ikut menentukan pencapaian pembangunan kependudukan. Di sisi lain, kegagalan program Keluarga Berencana dapat pula mengindikasikan kegagalan pembangunan kependudukan.

4.2 Umur Kawin Pertama

Hasil dari Susenas Maret 2020 dapat memberikan potret keberhasilan dan hal yang masih menjadi pekerjaan untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Rata-rata usia perkawinan pertama baik perempuan dan laki-laki di Sumatera Barat sudah jauh melewati usia yang disyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, di mana menurut undang-undang tersebut usia laki-laki untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun.

Tabel 4.2.1 Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	26,53	25,00	25,71
Perempuan	22,55	20,69	21,53
Laki-laki + Perempuan	24,40	22,64	23,44

Sumber: Susenas 2020

Dari Tabel 4.2.1 terlihat bahwa rata-rata usia perkawinan pertama di Sumatera Barat secara keseluruhan adalah antara 23 dan 24 tahun. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, rata-rata usia perkawinan pertama laki-laki di Sumatera Barat adalah 25,71 tahun, lebih tinggi dibanding usia perkawinan pertama perempuan yaitu 21,53 tahun.

Sementara bila dilihat menurut wilayah tempat tinggal, pola yang tampak relatif sama untuk daerah perkotaan dan perdesaan yaitu usia perkawinan pertama laki-laki lebih tinggi dibanding usia perempuan. Ini mengindikasikan hal yang baik terutama untuk perempuan karena usia perkawinan pertama di atas 20 tahun perempuan dianggap telah siap untuk bereproduksi karena apabila hamil di usia muda rahim belum siap dan membuat saluran kelahiran mudah pecah yang akibatnya dapat menyebabkan kematian saat melahirkan (BKKBN, 2013).

Dari Tabel 4.2.2 terlihat bahwa prevalensi pernikahan perempuan yang usia perkawinan pertama di bawah 16 tahun sebesar 3,15 persen dan laki-laki yang usia perkawinan pertama di bawah 19 tahun sebesar 4,05 persen. Prevalensi ini banyak terjadi di daerah perdesaan, dengan perbandingan untuk daerah perdesaan hampir

dua kali lipat daerah perkotaan. Hal ini perlu perhatian semua pihak, mengingat pernikahan usia anak pada perempuan dapat berdampak banyak hal, diantaranya anak perempuan usia 10-16 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20-24 tahun (UNICEF, 2005).

Tabel 4.2.2 Persentase Laki-laki dan Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama Laki-laki di bawah 19 tahun dan Perempuan di bawah 16 Tahun menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2020

Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	2,29	5,49	4,05
Perempuan	1,72	4,37	3,15

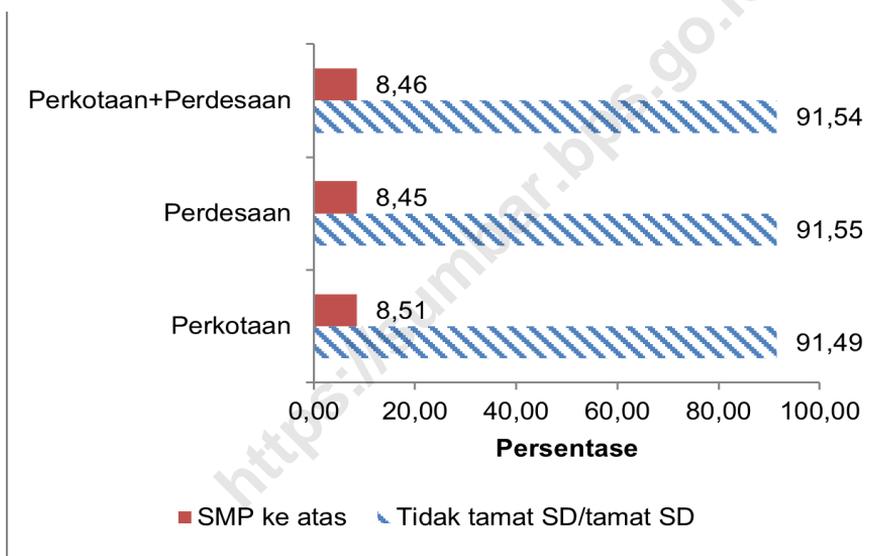
Sumber: Susenas 2020

Selain itu, banyak anak yang sudah menikah akan mengalami putus sekolah. Hal ini dapat menyebabkan semakin sempitnya peluang perempuan muda memperbaiki kesejahteraan, sehingga dapat memperpanjang masalah sosial yang sudah ada. Dari Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia, bayi yang dilahirkan oleh perempuan dibawah umur punya resiko kematian lebih besar. Bayi tersebut juga punya peluang meninggal dua kali lipat sebelum mencapai usia satu tahun.

Berdasarkan data Susenas 2020, Sumatera Barat tercatat memiliki angka perkawinan anak perempuan yang usia perkawinan pertama di bawah 16 tahun sekitar 3,15 persen. Persentase ini berarti tiga dari 100 anak perempuan di Sumatera Barat melakukan perkawinan pertama dibawah 16 tahun. UNICEF (2016) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dengan pendidikan. Anak yang menikah dibawah umur cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah. Dari Gambar 4.2.1,

tingkat pendidikan perempuan yang umur perkawinan pertama di bawah 16 tahun paling banyak adalah tidak tamat/tamat SD/ sederajat yaitu sebesar 91,54 persen. Tidak ada perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan, yaitu didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD/sederajat atau bahkan tidak tamat.

Gambar 4.2.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di Bawah 16 Tahun Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan yang di Tamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020

Menyikapi fenomena perkawinan usia anak dalam penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dari satu sektor saja. Ada banyak faktor yang terlibat dalam menurunkan angka perkawinan usia anak ini, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Pada sektor kesehatan, perlu adanya pemberian penyuluhan tentang penggunaan alat/cara KB terhadap perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia dibawah 16 tahun agar dapat menunda kehamilan sampai umur 20 tahun.

Jika dilihat dari penggunaan alat/cara kontrasepsi pada perempuan yang umur perkawinan pertama di bawah 16 tahun maka

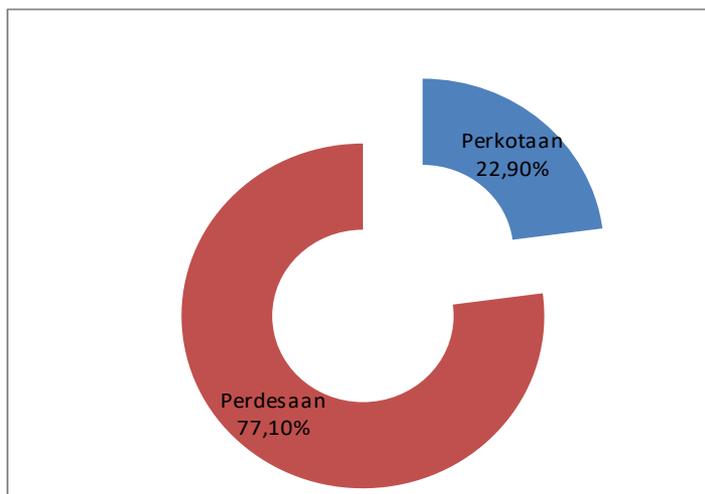
sedikit dari mereka yang menggunakan alat kontrasepsi. Daerah perkotaan yang sedang menggunakan alat kontrasepsi ada sebesar 38,66 persen sedangkan daerah perdesaan sebesar 41,70 persen (Tabel 4.2.3).

Tabel 4.2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Usia Perkawinan Pertama di Bawah 16 Tahun dan Penggunaan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2020

Penggunaan KB	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sedang	38,66	41,70	41,03
Tidak/Pernah	61,34	58,30	58,96

Sumber: Susenas 2020

Gambar 4.2.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Usia Perkawinan Pertama di Bawah 16 Tahun dan Tidak/Pernah Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2020



Sumber: Susenas 2020

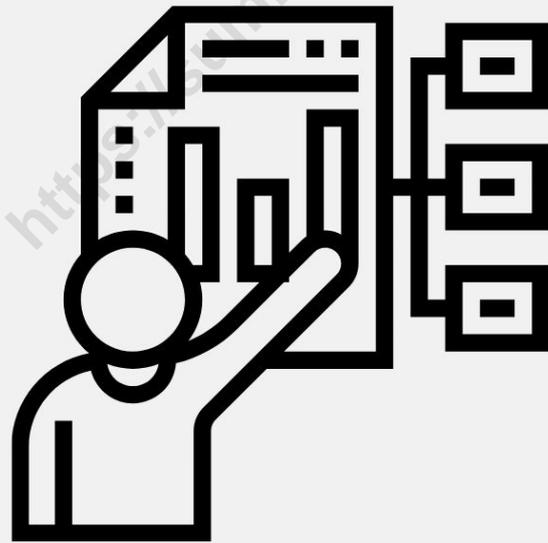
Jika dipilah pada perempuan yang telah melakukan perkawinan pertama di bawah 16 tahun dan tidak mau/pernah menggunakan alat/cara KB, terlihat di daerah perdesaan sangat besar, yaitu 77,10 persen sedangkan di perkotaan tercatat 22,90 persen (Gambar 4.2.2). Jika hal ini tidak segera dikendalikan, dapat menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan remaja.

<https://sumbar.bps.go.id>



BAB V

PENUTUP



<http://www.bps.go.id>

BAB 5

PENUTUP

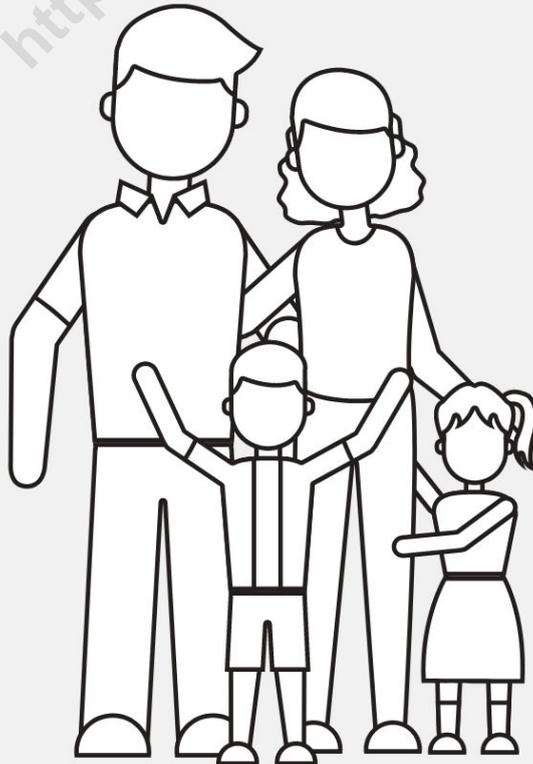
Dari ulasan tentang kependudukan dan Keluarga Berencana yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat diambil secara garis besar yaitu:

1. Penduduk perempuan di Sumatera Barat pada tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki, hal ini dibuktikan dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 101,39.
2. Struktur penduduk di Sumatera Barat cenderung sudah meninggalkan struktur penduduk muda. Ini ditunjukkan oleh bentuk piramida penduduk yang mempunyai kecenderungan melebar di kelompok umur muda. Selain itu angka rasio tua muda penduduk Sumatera Barat tahun 2020 juga mencapai angka 25,94.
3. Angka rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 47,09 persen, yang artinya setiap 100 orang berumur produktif di Sumatera Barat menanggung 47 orang yang non produktif.
4. Terdapat perbedaan perilaku penggunaan alat/cara KB menurut wilayah tempat tinggal, pendidikan yang ditamatkan, kelompok pengeluaran dan kelompok umur. Secara total di Sumatera Barat, semakin tinggi pendidikan perempuan kecenderungan untuk menggunakan alat/cara KB semakin rendah.
5. Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat/cara kontrasepsi dengan metode modern sebesar 96,81 persen dan sisanya 3,19 persen menggunakan metode tradisional. Jenis alat/cara KB modern yang paling diminati adalah suntikan

6. Terdapat pola yang tampak relatif sama pada usia perkawinan pertama menurut wilayah tempat tinggalnya, usia perkawinan pertama laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.
7. Masih adanya perempuan yang usia perkawinan pertama di bawah 16 tahun dan laki-laki yang usia perkawinan pertama di bawah 19 tahun di Sumatera Barat pada tahun 2020.

<https://sumbar.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

Bappeda Sumatera Barat. 2016. Musrembang RJMD 2016

Bappenas. 2016. Kependudukan dan Keluarga Berencana. Online [accessed on 27 September 2016] www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9745/1795

BKKBN. 2013. '4 Terlalu 3 Terlambat' Penyebab Naiknya Angka Kematian Ibu. Online [accessed on 7 Desember 2016] <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/17/mxxxxn-4-terlalu-3-terlambat-penyebab-naiknya-angka-kematian-ibu>

BKKBN Riau. 2016. Kependudukan Dalam Prespektif Pembangunan Ekonomi Guna Pembangunan Nasional. Online [accessed on 7 Desember 2016] <http://riau.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm>.

BKKBN. 2017. Usia Pernikahan ideal 21-25 tahun. Online [accessed on 2 November 2018] <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>.

BPS. 2010. Profil Indikator Pendidikan Indonesia 2009 (Kajian Indikator). Jakarta: CV. Nario Sari

BPS. 2010. Modul I Struktur Umur Penduduk (Workshop Hasil Olah Cepat SP2010). Jakarta

BPS. 2015. Pedoman Analisis Data Kependudukan dan KB hasil Susenas 2015. Jakarta: BPS

BPS Sumatera Barat. 2019. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2019. Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS Sumatera Barat. 2018. Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat 2018. Hasil Susenas Maret 2018. Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS. 2016. Sirusa (Sistem Rujukan Statistik)

BPS Sumatera Barat. 2021. Potret Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sumatera Barat: "Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia"

Christian, B dan Griffiths, T. 2016. Algorithms to live By: The Computer Science of Human Decision. The New York Times Book Review, Picador.

Columbia University. 2016. Demography Learning Module. Online [accessed on 31 October 2016] <http://www.columbia.edu/itc/hs/pubhealth/modules/demography/populationRatio.html>

Ekarini, S,M,B. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. (thesis S2, unpublished)

K, Widyanti, M, S. 2011. Keluarga Berencana. (bahan ajar Pasca Sarjana), Lembaga Demografi FEUI.

Pandi, E.Srihartati, 1981., Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana Dan Program kependudukan, Penerbit: Pusat Pendidikan BKKBN, Jakarta.

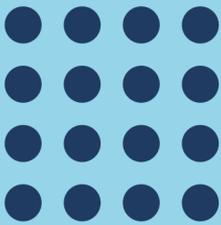
Tjiptoherijanto, P. 2001. Majalah Perencanaan Pembangunan. Edisi 23

Tjiptoherijanto, P, 1995, Arah Kebijakan Makro Pemerintah dalam Mengantisipasi Pasar Global, makalah disampaikan pada Seminar Bisnis STIEIPWI. Jakarta, 31 Oktober 1995.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UNICEF. 2005. Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. [diunduh 10 Desember 2019]. https://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf.

UNICEF. 2016. A fair chance for every child. [diunduh 10 Desember 2019]. https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf .



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang, 25135

Telp. 442158, 442159 Fax. 442161

E-mail : sumbar@bps.go.id

Homepage : <http://sumbar.bps.go.id>

ISSN 2723-1828



9 772723 182219